

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR TAHUAN GANDA  
TAHUN 2023**



**Jl. Raya Natar No.195A,Natar - Lampung Selatan  
TELEPON: (0721) 91403**



## PENJELASAN UMUM

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 8 (delapan) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (stakeholders).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tata Kelola (Governance) Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan di jelaskan kembali dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Keloala Bagi Bank perkreditan Rakyat, mewajibkan semua Bank Prekreditan Rakyat melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat diharapkan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga Bank Tahanan Ganda dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada Bank Tahanan Ganda senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.



Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG Bank PT. BPR Tahanan Ganda Ganda yakni sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank menyampaikan dan melaporkan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan, serta Laporan keuangan kepada stakeholders secara tepat waktu.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki Job descriptions untuk semua jajaran berdasarkan ukuran tugas pokok dan fungsinya masing . Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.
3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepahik serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/ menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 5 / SEOJK.03/2016 Perihal: Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (Self Assessment). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank Tahanan Ganda yang memiliki modal inti < 50 Milyard harus melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank Tahanan Ganda telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2023 dengan meliputi 9 (sembilan) faktor di atas. Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2023 PT. BPR Tahanan Ganda dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2023.



## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT BPR TAHUAN GANDA
Alamat	Jl. Raya Natar No.195A,Natar - Lampung Selatan
Nomor Telepon	(0721) 91403
Posisi Laporan	31 Desember 2023
Peringkat Komposit	(Tidak ada peringkat komposit)
Predikat Komposit	(Tidak ada predikat komposit)
Kesimpulan / Penjelasan	(Tidak ada kesimpulan / penjelasan)

### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Herikson Laju Siahaan, S.E
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p>		
2.	Nama	:	Suhartanto, A.Md
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</p> <p>d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau</p>		



dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;  
e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

mengawasi kinerja direktur utama dan direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Penjelasan Lebih Lanjut :

nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Damri Siagian, S.E
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
	b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank		
2.	c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		
	d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
	e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
	Nama	:	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :			
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
	b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank		
	c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		
	d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
	e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.			
b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.			
c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.			
d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.			



- |  |
|--|
| e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2022.                                       |
| f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. |
| g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.   |

Penjelasan Lebih Lanjut :
---------------------------

nihil
-------

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
nihil	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	nihil	

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -



	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
nihil			

## C. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Herikson Laju Siahaan, S.E	Rp0	0%
2.	Suhartanto, A.Md	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Herikson Laju Siahaan, S.E	-	-	0%
2.	Suhartanto, A.Md	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Anggota direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

## D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR



No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Herikson Laju Siahaan, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Suhartanto, A.Md	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Herikson Laju Siahaan, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Suhartanto, A.Md	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

## E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Damri Siagian, S.E	Rp0	0%
2.	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
nihil			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Damri Siagian, S.E	-	-	0%
2.	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				



**F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Damri Siagian, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Damri Siagian, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				



## G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp267.721.044	2	Rp34.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp50.200.151	0	Rp0
3.	Tantiem	2	Rp28.403.118	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp346.324.313		Rp34.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi mendapat kan gaji dan tunjangan perumahan serta THR sedangkan komisaris hanya mendapatkan gaji					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
nihil			



## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
asيو gaji terendah dan tertinggi sudah dihitung berdasarkan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun	

## I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Januari 2023	2	a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke IV Tahun 2022 b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito) c. Perkembangan Aset Tahun 2022 d. Perkembangan Laba Rugi 2022 e. Tingkat Kesehatan Bank desember 2022
2.	13 April 2023	2	a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke I Tahun 2023 b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito) c. Perkembangan Aset Triwulan ke 1 Tahun 2023 d. Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke 1 2023 e. Tingkat Kesehatan Bank Maret 2023
3.	24 Juli 2023	2	a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke 2 Tahun 2023 b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito) c. Perkembangan Aset Triwulan ke 2 Tahun 2023 d. Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke 2 2023 e. Tingkat Kesehatan Bank Juni 2023
4.	11 Oktober 2023	2	a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke 3 Tahun 2023 b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito)



			c.Perkembangan Aset Triwulan ke 3 Tahun 2023 d.Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke 3 2023 e. Tingkat Kesehatan Bank September 2023
5.	25 Oktober 2023	4	a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke 3 Tahun 2023 b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito) c.Perkembangan Aset Triwulan ke 3 Tahun 2023 d.Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke 3 2023 e. Tingkat Kesehatan Bank September 2023
6.	04 Desember 2024	2	a. Evaluasi kinerja BPR Tahan Ganda Tahun 2023 dan pencapaian RBB Tahun 2023 b. Perkembangan kredit yang telah dicapai maupun belum c. Dana pihak ketiga yang sudah tercapai maupun belum tercapai d. Laba rugi yang telah tercapai maupun belum tercapai sampai Desember 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali untuk memberikan dan mengevaluasi bebijakan strategi BPR dalam menjalankan usaha			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Damri Siagian, S.E	5	0	100%
2.	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E	0	0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
komisaris sudah menjalankan rapat dewan komisaris melalui tatap muka				



## J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
nihil								

## K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
nihil		

## L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



1.								
2.								
3.								
Penjelasan Lebih Lanjut :								
nihil								

## M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 Agustus 2023	Sosial	acara HUT RI 17 agustusan	karang taruna	Rp200.000
2.	11 Agustus 2023	Sosial	pengajian AKBAR ALhidayah dusun 1 Natar	kecamatan natar	Rp200.000
3.	15 Agustus 2023	Sosial	iuran partisipasi dalam rangka HUT RI	karang taruna desa karang anyar	Rp50.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Semua kegiatan yang diberikan sumbangan berupa kegiatan sosial tidak ada kegiatan politik

NATAR, 29 Januari 2024

**PT BPR TAHUAN GANDA**

Disetujui

Mengetahui

Herikson Laju Siahaan, S.E  
Direktur Utama

Damri Siagian, S.E  
Komisaris Utama